LAPORAN



HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

TRIWULAN II PERIODE APRIL - JUNI 2022

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TRIWULAN II PERIODE APRIL - JUNI 2021 DI PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Disahkan di Pangkalan Balai Pada Hari Kamis, 30 Juni 2022

Ketua Tim Survei,

WARNO, S H. NIP. 19670904 199103 1 002

Megetahui, Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai,

> SILVI ARIANI, S.H.,M.H. NIP. 19760929 200112 2 006

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Landasan Hukum	2
1.4. Rencana Kerja	2
BAB II	4
METODOLOGI	4
2.1. Metode Penelitian	4
2.2. Populasi Dan Sampel	4
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	4
2.5. Teknik Analisis Data	5
2.6. Tahapan pelaksanaan	5
BAB III	7
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
3.1. Profil responden	7
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator	10
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan	20
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja	
pada pengadilan	21
BAB IV	23
PENUTUP	23
4.1. Kesimpulan	23
4.2. Rekomendasi	23
4.3. Tindaklanjut Atas Unsur Dengan Nilai Terendah	24
LAMPIRAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
 Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
 Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui aplikasi Sisuper. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu dari 01 April – 30 Juni 2022 dan diperoleh 137 responden.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Hakim pengawas/Penanggungjawab survei akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3 Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang Baik
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Baik
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Sangat Baik

BAB II INDEKS PERSEPSI KORUPSI

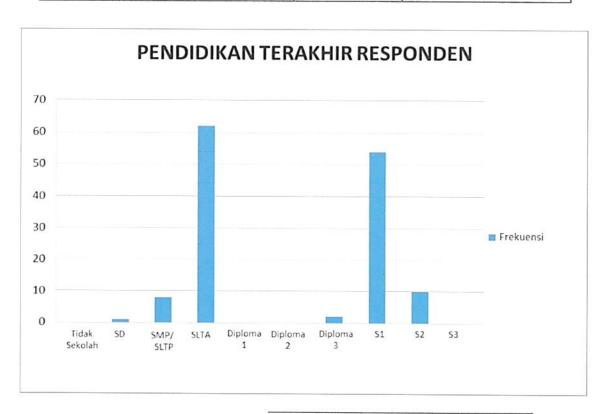
3.1. Profil responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mayoritas memiliki latar SMU sebanyak 62 (45%) responden.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Sekolah	0	0
2	SD	1	1
3	SMP	8	6
4	SMA	62	45
5	D1	0	0
6	D2	0	0
7	D3	2	2
8	S1	54	39
9	S2	10	7
10	S3	0	0
	JUMLAH	137	100



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 81 (59%) responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II mememiliki pekerjaan Lainnya.

Tabel 5.
JENIS PEKERJAAN RESPONDEN

NO	PEKERJAAN UTAMA	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	PNS	2	1
2	TNI	0	0
3	POLRI	20	15
4	SWASTA	13	9
5	WIRAUSAHA	20	15
6	TENAGA KONTRAK	1	1
7	LAINNYA	81	59
	JUMLAH	137	100



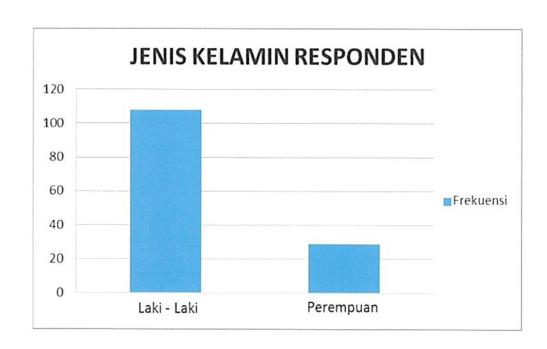
3.1.3. Jenis Kelamin

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 108 (78,83%) responden.

Tabel 6

Jenis Kelamin Responden

МО	Jenis Kelamin	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Laki-laki	108	78,83
2	Perempuan	29	21,16
	JUMLAH	137	100

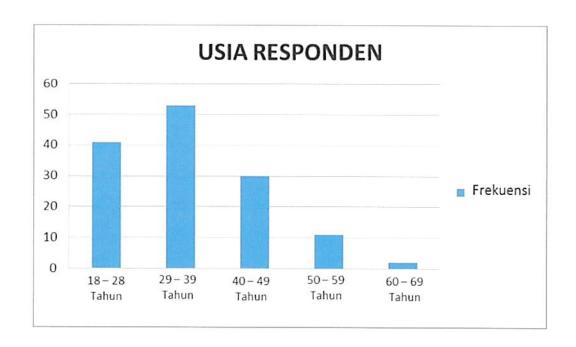


3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan jumlah 53 (38,69%) responden.

Tabel 7.
USIA RESPONDEN

NO	UMUR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1.	18 – 28 Tahun	41	29,93
2.	29 – 39 Tahun	53	38,69
3.	40 – 49 Tahun	30	21,90
4.	50 – 59 Tahun	11	8,03
5.	60 – 69 Tahun	2	1,46
	Jumlah	137	100



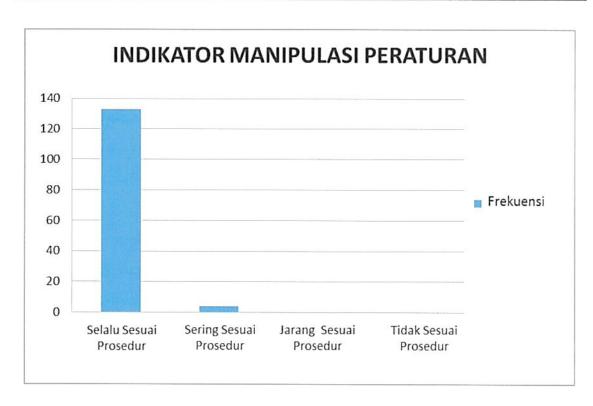
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil analisis perolehan "133 (97%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu Sesuai Dengan Prosedur (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,971" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 9.
Indeks pada indikator manipulasi peraturan

МО	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu Sesuai Prosedur	А	4	133	97
2	Sering Sesuai Prosedur	В	3	4	3
3	Jarang Sesuai Prosedur	С	2	0	0
4	Tidak Sesuai Prosedur	D	1	0	0
	JUMLAH			137	100

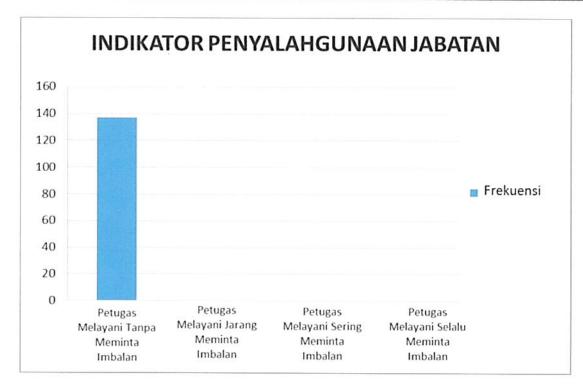


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

NO	JAWABAN	мити	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	А	4	137	100
2	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	В	3	0	0
3	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	С	2	0	0
4	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	D	1	0	0
	JUMLAH			137	100

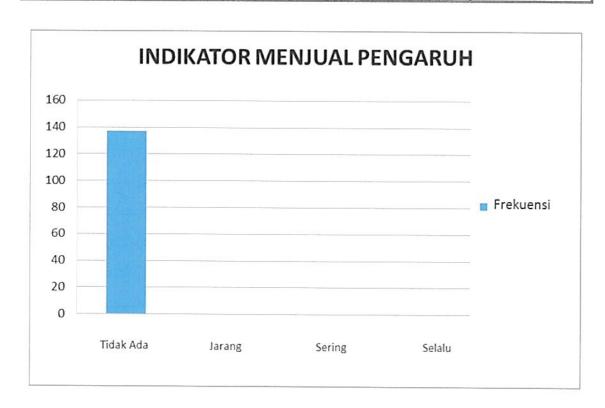


3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh

NO	JAWABAN	мити	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Tidak Ada	Α	4	137	100
2	Jarang	В	3	0	0
3	Sering	С	2	0	0
4	Selalu	D	1	0	0
	JUMLA	137	100		

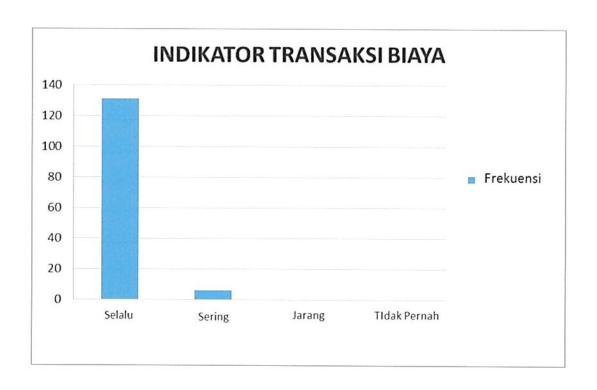


3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan "131 (95,63%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,956" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 12.
Indeks pada indikator transaksi biaya

NO	JAWABAN	мити	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	A	4	131	95,63
2	Sering	В	3	6	4,37
3	Jarang	С	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
	JUML	AH	137	100	



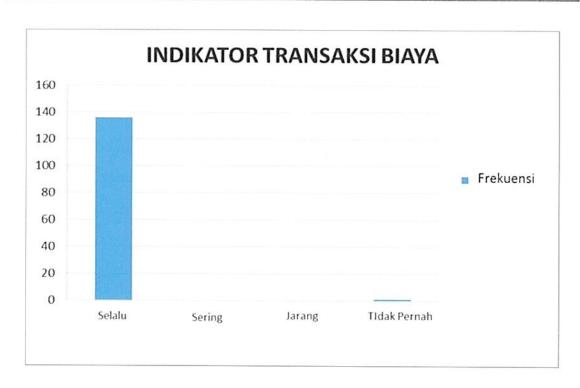
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 13.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

NO	JAWABAN	мити	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	Α	4	136	100
2	Sering	В	3	0	0
3	Jarang	С	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	1	4,17
	JUMI	-AH	137	100	

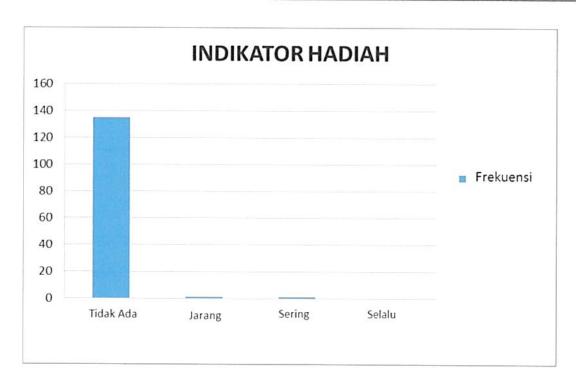


3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil analisis perolehan "135 (98%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "3,978" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 14.
Indeks pada indikator hadiah

NO	JAWABAN	MUTU SKOR		FREKUENSI	PERSENTASE (%)	
1	Tidak Ada	Α	4	135	98	
2	Jarang	В	3	1	1	
3	Sering	С	2	1	1	
4	Selalu	D	1	0	0	
	JUMLA	AH .	137	100		

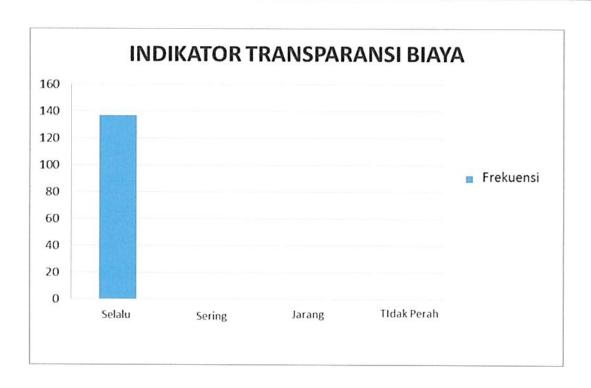


3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi biaya ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Selalu (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 15.
Indeks pada indikator transparansi biaya

NO	JAWABAN	мити	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)
1	Selalu	Α	4	137	100
2	Sering	В	3	0	0
3	Jarang	С	2	0	0
4	Tidak Pernah	D	1	0	0
	JUMLA	AH	137	100	

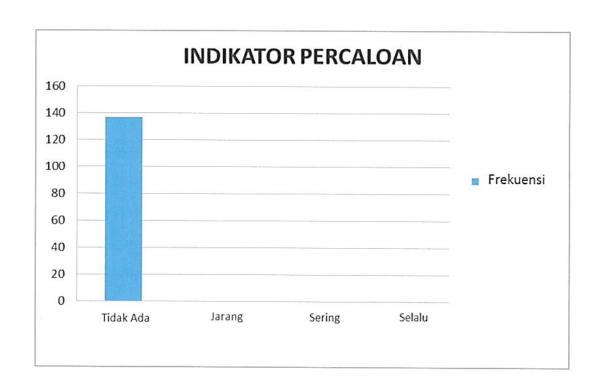


3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan Pembayaran ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 16.
Indeks pada indikator percaloan

NO	JAWABAN	MUTU	SKOR	FREKUENSI	PERSENTASE (%)	
1	Tidak Ada	А	4	137	100	
2	Jarang	В	3	0	0	
3	Sering	Sering C 2		0	0	
4	Selalu	D	1	0	0	
	JUML	AH	137	100		



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata – rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 – 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 17.
Indeks pada indikator perbuatan curang

NO	JAWABAN	MUTU SKOR FREKUENSI		FREKUENSI	PERSENTASE (%)	
1	Tidak Ada	Α	4	137	100	
2	Jarang	В	B 3 0	0	0	
3	Sering	C 2		0	0	
4	Selalu	D	1	0	0	
***************************************	JUMLA	AH	137	100		

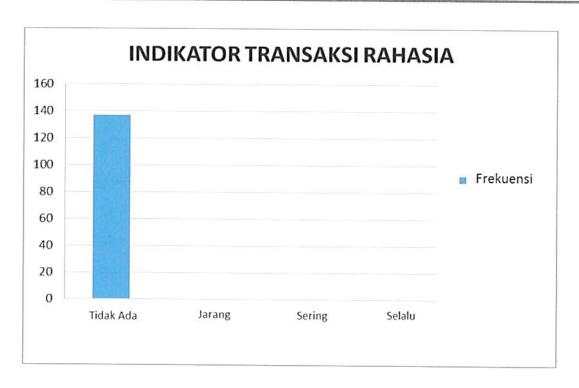


3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil analisis perolehan "137 (100%)" dari jumlah responden memilih jawaban "Tidak Pernah (A)" pada index rata — rata skor sebesar "4.00" dimana berada pada interval skor 3,26 — 4,00 dengan kategori "Sangat Baik", Indeks dapat diartikan bahwa kinerja satuan kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II "Sangat Baik".

Tabel 18.
Indeks pada indikator transaksi rahasia

NO	JAWABAN	BAN MUTU SKOR FREKUENS		FREKUENSI	PERSENTASE (%)	
1	Tidak Ada	Α	4	137	100	
2	Jarang	В	3	0	0	
3	Sering	C 2		0	0	
4	Selalu	D	1	0	0	
	JUMLA	AH	137	100		



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II sebesar "96,76".

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NO	RUANG LINGKUP	SKOR RATA - RATA	SKOR RATA – RATA TERTIMBANG	KATEGORI	
1	Manipulasi Peraturan	3,971	0,397	Sangat Baik	
2	Penyalahgunaan	4,00	0,4	Sangat Baik	
3	Menjual Pengaruh	4,00	0,4	Sangat Baik	
4	Transaksi Biaya	3,956	0,396	Sangat Baik	
5	Biaya Tambahan	4,00	0,4	Sangat Baik	
6	Hadiah	3,978	0,398	Sangat Baik	
7	Transparansi Biaya	4,00	0,4	Sangat Baik	
8	Percaloan	4,00	0,4	Sangat Baik	
9	Perbuatan Curang	4,00	0,4	Sangat Baik	
10	Transaksi Rahasia	4,00	0,4	Sangat Baik	
Jun	nlah Skor Rata – Rata	a Tertimbang	3	.991	
	IPK		99,76		

Indeks "99,76" tersebut jika dkonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan "SANGAT BAIK". Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka "81.26 – 100.00"

Tabel 20. Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	мити	KINERJA	
1	1.00 - 1.75	25 - 43.75	1	Tidak Baik	
2	1.76 - 62.50	43.76 - 62.50	2	Kurang Baik	
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	3	Baik	
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Sangat Baik	

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 21. Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II
1	Pelayanan terhadap masyarakat sudah baik
2	Pelayanan sudah baik
3	Saya sangat menyukai pelayanan Dari pengadilan ini, karena prosesnya cepat
4	Semua pelayanan Sudan sangat baik, kiranya kita sebagai manusia harus terus belajar dan meningkat kan Diri agar kualitas kitapun makin tinggi
5	Sudan pas
6	Ditingkatkan pelayanannya
7	Semoga semakin sukses
8	Terimakasih atas pelayanannya
9	Terima kasih atas pelayanan terbaiknya
10	semoga semakin sukses

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II memiliki Indeks Persepsi Korupsi "99,76" atau "3.99" dan masuk pada kategori "Sangat Baik"

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

- Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3.971 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,956 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,978 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.
- Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 dengan kategori Bersih Dari Korupsi.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Kelas II Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks dengan persepsi kategori Sangat Baik. Namun dari

sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Transaksi Biaya**, **Manipulasi Peraturan** dan **Hadiah** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

Segenap warga Pengadilan Negeri Pangkalan Balai harus selalu berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dengan selalu mempedomani *Standard Operating Procedure* (SOP) dan juga selalu berkomitmen dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

4.3. Tindaklanjut Atas Unsur Dengan Nilai Terendah

Berdasarkan analisa terhadap data kuisioner Persepsi Korupsi dan telah diketahui sebagaimana di atas, unsur yang mendapatkan penilaian terendah indikator *Transaksi Biaya*, *Manipulasi Peraturan* dan *Hadiah*.

Adapun tindak lanjut atas hasil suvei khusunya nilai terendah dengan mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Transaksi Biaya

Memasang Banner standar pelayanan di ruang PTSP yang didalamnya memuat biaya dari setiap pelayanan yang ada serta mengupload biaya perkara pada website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dan juga meletakkan besaran panjar biaya perkara tersebut pada ruang pelayanan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk menciptakan transparansi dalam berperkara di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

2. Manipulasi Peraturan

Melakukan kegiatan *briefing* oleh petugas supervisi PTSP setiap harinya untuk selalu mengingatkan petugas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku dan juga mengupload prosedur berperkara tersebut ke dalam website Pengadilan Negeri Pangkalan Balai untuk memudahkan pengguna layanan dalam mendapatkan informasi berperkara.

3. Hadiah

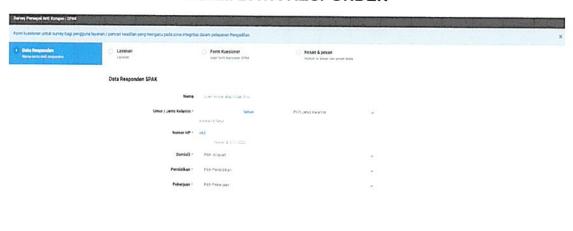
- Memasang stiker anti gratifikasi di setiap komputer pelayanan.
- Selalu menghimbau kepada setiap pengguna layanan untuk tidak memberikan tanda terima kasih dalam bentuk apapun selain daripada biaya PNBP yang telah ditentukan di setiap pelayanan.

LAMPIRAN

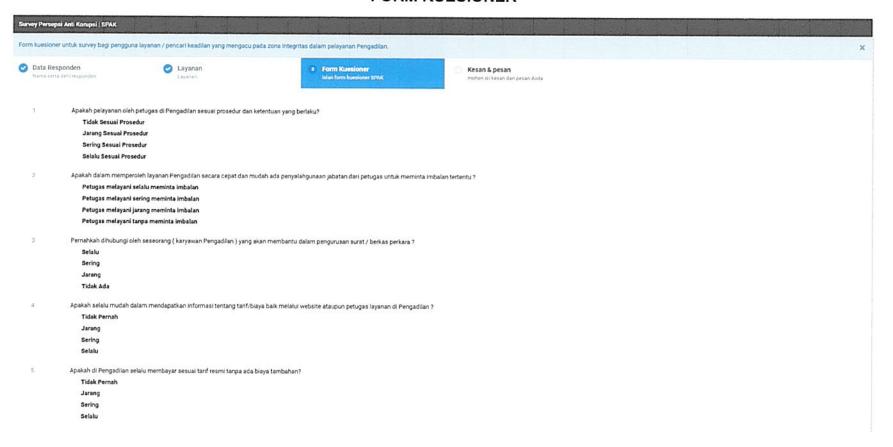
TAMPILAN APLIKASI SISUPER PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI



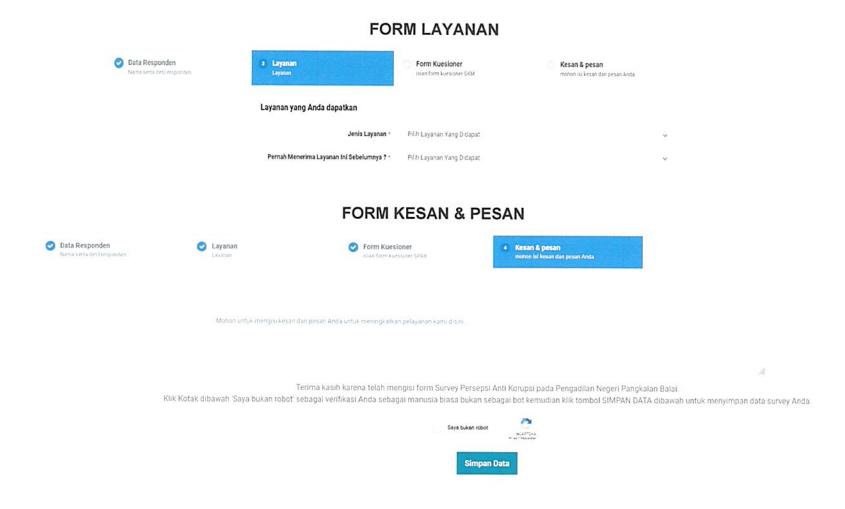
FORM DATA RESPONDEN



FORM KUESIONER



5	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?
	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
7	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?
	Tidak Pernah
	Jarang
	Sering
	Selalu
3	Apakah pemah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?
	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
)	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?
	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada
0	Apakah pernah mengurus perkara melalul Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?
	Selalu
	Sering
	Jarang
	Tidak Ada



HASIL SURVEY IPAK TRIWULAN II PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

SURVEY INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NILAI INDEKS

3,99 / 99,76 %

Periode 1 April 2022 sampai 30 Juni 2022

JUMLAH	137 RESPONDEN	
JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 108 ORANG	

PEREMPUAN: 29 ORANG

PENDIDIKAN Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0 ORG

ORG

SD : 1 ORG Diploma 3 : 2 ORG SMP : 8 ORG S1 : 54 ORG

PEKERJAAN PNS : 2 ORG SWASTA : 13 ORG

TNI: 0 ORG WIRAUSAHA: 20 ORG

POLRI : 20 ORG TENAGA KONTRAK : 1 ORG

LAINNYA: 81 ORG

DATA UMUR RESPONDER IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

Indeks Total Data Umum F	lesponden Data Domisili Responden	Data Umur Responden	Data Layanan Nilai Per Unsur	
Deskripsi	Jumlah (Orang)		% (Persen)	
18 - 28 Th	41		29,93	
29 - 39 Th	53		38,69	
40 - 49 Th	30		21,90	
50 - 59 Th	11		8.03	
60 - 69 Th	2		1,46	
Total	137			

DATA NILAI PER UNSUR IPAK TRIWULAN II DARI APLIKASI SISUPER

eks Total Da	ata Umum Respond	en Dat	a Domisili Re	esponden	Data Um	ur Responder	n Data	a Layanan	Nilai Pe	r Unsur	
Deskripsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Keterangan
Jumlah	544	548	548	542	548	545	548	548	548	548	
NRR Per RL	3.971	4.000	4,000	3,956	4.000	3.978	4,000	4,000	4,000	4.000	39,905
NRR Tertimbang	0,397	0,400	0,400	0,396	0,400	0,398	0,400	0,400	0,400	0.400	3,991
IPAK Unit Pelayar	nan										3,99

TIGA UNSUR TERENDAH

EVALUASI NILAI UNSUR			
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur		Nilai
1	Apakah se	alalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?	542
2	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?		544
3	Apakah m	emberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta) ?	545

TIGA UNSUR TERTINGGI

